BAB II

PEMBAHASAN

## 2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

## 2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu tatanan kehidupan yang digambarkan secara ideal yang meliputin kehidupan material dan spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba untuk melihat pada mendapatkan titik keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lain. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan). Definisi kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2003: 153), adalah sebagai berikut : “Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah”. Berdasarkan definisi tersebut dapat memberikan gambaran, bahwa kesejahteraan sosial dapat membantu orang-orang yang bermasalah dengan mendayagunakan kegiatan-kegiatan yang terpadu dan sistematis

 Kerangka ini harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam melakukan intervensinya. Konsep kesejahteraan sosial adalah menolong individu untuk menolong dirinya sendiri (*help people to helping themselves*). Penelitian dalam kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sosial yang dihadapi, jenis-jenis penelitian pekerjaan sosial yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dengan berbagai langkah dalam melakukan penelitian tersebut. Definisi kesejahteraan sosial menurut Migley dalam Isbandi, (2013: 6) : “Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusian yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.”

 Rumusan di atas menyatakan bahwa kesejahteran sosial merupakan tatanan kehidupan manusia antara keseimbangan aspek sosial, material, dan spiritual. Kesejahteraan sosial dalam sejarah perkembangannya, pengertian mengenai kesejahteraan sosial mengalami perkembangan. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto, (2010: 3) adalah sebagai berikut:

 Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga - lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan konstribusi terhadap pemacahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

 Definisi tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau lembaga sosial yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual sehingga akan mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya, apabila pemenuhan kebutuhan tadi semuanya sudah tercekupi. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat harus ditingkatkan menjadi lebih baik.

 Perkembangan ilmu kesejahteraan sosial ini sendiri pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial, pada tahap awal masih sama dengan pekerjaan kesejahteraan sosial. Definisi kesejahteraan sosial menurut UU tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang dikutip Fahrudin (2012: 9) adalah sebagai berikut :

 Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Defini di atas menjelaskan kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan yang bertujuan dengan pelayan untuk individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan aturan Negara yang telah ditetapkan, terutama aturan-aturan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin.

### 2.1.2 Tujuan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

 Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) adalah sebagai berikut :

* 1. Pemeliharaansistem
	2. Pengawasan sistem dan
	3. Perubahan sistem

Penjelasan yang pertama, yakni pemeliharaan sistem adalah pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat seperti definisi makna dan tujuan hidup, motivasi, dan pelaksanaan norma peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Penjelasan yang kedua, yakni pengawasan sistem adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Penjelasan yang ketiga, yakni perubahan sistem adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan

Tujuan tersebut menjelaskan bahwa tujuan yang pertama adalah meningkatkan taraf tercukupinya kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan kelangsungan hidup, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Tujuan yang kedua adalah menangani dan mengembalikan suatu keberfungsian sosialnya dalam bermasyarakat jika terdapat masalah-maslah sosial yang terjadi sebelumnya. Tujuan yang ketiga adalah menjaga ketahanan kesejahteraan sosialnya ketika terdapat masalah dan masalah tersebut dapat ditangani. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap sesame yang mempunyai masalah sosial yang untuk ditangani. Tujuan yang kelima adalah meeningkatkan kualitas kesejahteraan setiap anggota masyarakat yang memiliki suatu masalah sosial.

### 2.1.3 Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial

 Fungsi kesejahteraan sosial pada dasarnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang dialami bersama dengan memberikan penghasilan, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keselamatan pribadi yang memadai. Fungsi Kesejahteraan sosial lainnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan sosial, perlindungan sosial, membangun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam tujuannya yaitu usaha kesejateraan sosial dalam skala pembangunan sosial.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin, (2012: 12) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

 Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

1. Fungsi penyembuhan (*curative*)

 Kessejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut daapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

1. Fungsi Pengembangan (*development*)

 Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (*supportive*)

 Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

 Fungsi kesejahteraan sosial di atas dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin pemerintah serta pihak lembaga yang terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah tersebut. Fungsi kesejahteraan sosial tersebut terdapat penjelasan dari masing-masing tujuan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial.
4. Fungsi penunjang menjadi salah satu kegiatan untuk membantu mencapai tujuan di bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lainnya.

d) Fungsi penunjang menjadi salah satu kegiatan untuk membantu mencapai tujuan di bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lainnya.

### 2.1.4 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

 Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial, karena bidang kesejahteraan sosial cakupannya sangat luas. Dalam arti sempit dijelaskan menurut Fink (1974), Friedlander (1980), Mendoza (1981), dan Zastrow (1996) dalam Isbandi (2005: 128), antara lain meliputi:

1. Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan  (Service Delivery System).
2. Bidang yang terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga.
3. Bidang yang terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-An Anak dan Generasi Muda.
4. Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia).
5. Bidang yang terkait dengan Kelompok Khusus.
6. Bidang yang terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial).
7. Bidang yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan.
8. Bidang yang terkait dengan Perumahan dan Lingkungan Sosial.
9. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat.
10. Bidang yang terkait dengan Perawatan Medik.
11. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa.
12. Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional.
13. Bidang yang terkait dengan Lembaga Pendidikan.
14. Bidang yang terkait dengan Area Lain.

## 2.2Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

### 2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial

 Pelayanan sosial dalah suatu kebijakan atau strategi dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial, tujuan lainnya yaitu mengebalikan keberfungsian sosial masyarakat yang mencangkup pemecahan berbagai masalah yang terkait dengan pelayanan sosial. Pelayanan sosial sebagai manfaat berwujud yang disediakan oleh badan-badan dan lembaga untuk memperbaiki disfungsi sosial dan mencegah masalah keberfungsian sosial. Definisi pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin, (2012: 51) adalah sebagai berikut :

 Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasra untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakatdan keberfungsian individual,untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalamkesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan akses pelayanan yang berupa bimbingan dan pertolongan yang bersifat informasi dan bimbingan dan pertolongan yang melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalahnya yang terjadi di sekitar masyarakat.

**2.2.2 Bidang-Bidang Pelayanan Sosial**

Masalah sosial dalam cakupannya yaitu masalah sosial, ekonomi, sosial-psikologis. Bidang-bidang pelayanan sosial tidak hanya mencangkup masalah dasar saja, tetapi masalah yang lebih luas mencangkup pelayanan klinis sampai penataan sistem masyarakat. Pelayanan sosial sebagai suatu gambaran suatu aktifitas pekerja sosial dalam praktik nya. Bidang-bidang pelayanan sosial menurut Merton & Nisbet (1976) dalam Wibhawa, (2010: 76) adalah sebagai berikut :

1. Perilaku Menyimpang (*Deviant behavior*)

1. Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja (*Crime and Juvenile Deliquency*).
2. Gangguan-gangguan mental (*Mental Disorders*)
3. Penggunaan obat-obatan terlarang (*drugs abuse*)
4. Kecanduan alcohol dan pemabukan (*Alcoholism and Dringking*)
5. Perilaku seksual (*Sexual Behavior*)

2. Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization*)

1. Krisis kependudukan dunia (*The Worlds Populations Crisis*)
2. Kesehatan dan ketidaksetaraan (*Equality and Linequality*)
3. Lansia (*Age and Aging*)
4. Peranan-peranan seksual (*Sex Roles*)
5. Ras dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat (*Race and Intergroup Relation*)
6. Disorganisasi komunitas dan masalah-masalah perkotaan (*Community Disorganization and Urban Probrems*)
7. Dunia Pekerjaan (*The World of Work*)
8. Kemiskinan dan Proletariat (*Provement and Proletariat*)
9. Kekerasan Kolektif (*Collective Violence*)

## 2.3 Tinjauan tentang Kemiskinan

### 2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah hal masalah sosial yang tidak lazim di tengah kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupannya, terutama bagi wilayah tertentu yang tingkat kesejahteraannya rendah. Pekerjaan sosial berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan adalah bentuk masalah sosial sosial yang serius dan krusial dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, (2002: 4) dalam Suharto, (2014: 133) adalah sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau batas kemiskinan (*proverty threshold*). Garis kemiskinan dalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan digambarkan sebagai segi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Paradigma lain mendefinikan kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan atau kondisi disfungsi, yaitu kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kebutuhan dasar lainnya yang tidak terpenuhi.

### 2.3.2 Bentuk Kemiskinan

Bentuk kemiskian dapat dikategorikan pada empat dimensi utama, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan dapat dibentuk berdasarkan tingkatan yang sesuai. Bentuk kemiskinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut

 Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidak mampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, pakian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Penentuan kemiskian absolut ini biasanya diukur melalui batsan kemiskinan atau garis kemiskinan (poverty line) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar atau kombinasi beberapa indikator untuk mempermudah pengukuran atau indikator tersebut umumnya di konvensikan dalam bentuk uang ( pendapatan atau pengeluaran ). Dengan demikian seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

1. Kemiskinan Relatif

 Kemiskian relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umumnya suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan masalnya Rp. 100.000 per kapita perbulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 200.000 per kapita per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat sekitar Rp. 400.000, maka secararelatif orang atau keluarga tersebut termasuk orang miskin.

1. Kemiskinan Kultural

 Kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orentasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (moderenisasi). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), fatalis, berorentasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa ciri yang memadai untuk kemiskinan kultural.

1. Kemiskinan Struktural

 Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan olehketidak beresan ataupun ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau selompok orang menjangkau sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka Proses dan praktek monopoli, oligopoli dalam bidang ekonomi, misalnya, melahirkan mata rantai kemiskinan yang sulit dipatahkan. Sekuat apapun motovasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktur demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang-orang tertentu. Contohnya para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau memiliki hanya sedikit lahan tanah, para nelayan yang tidak mempunyai perahu dan peralatan menangkap ikan, para pekerja yang tidak trampil (*unskilled labour*), termasuk kedalam mereka yang berada dalam golongan kemiskinan struktural.

### 2.3.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau fenomena. Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang individu, tetapi kemiskinan untuk dapat terlihat secara tepat yaitu dengan melihat ciri-ciri dari kemiskinan. Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto, (2004: 7) adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan komsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegitan sosial masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

 Kemiskinan dapat dilihat dari segi paling konteks, dengan adanya ciri utamanya yaitu adanya kebefungsian sosial masyarakat yang belum terpenuhi. Khususnya dalam menganggulangi kemiskinan pekerja sosial dapat membantu masyarakat miskin tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam arti luas.

### 2.3.4 Dimensi-Dimensi Kemiskinan

 Kemiskinan memiliki banyak dimensi, kelompok miskin tertentu terutama kalangan usia produktif, pemberian modal usaha dan keterampilan. Dimensi-dimensi kemiskinan menurut David Cox, (2004: 1) dalam Suharto, (2014: 132) adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggir oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktoreksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

### 2.3.5 Penyebab Kemiskinan

Menurut Tansey dan Ziegley (1991) dalam buku Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial (2004:8).Kemiskinan mempunyai tiga penyebab prinsip yaitu:

1. *Human Capital Deficiencies*,defisiensi modal amnusia berarti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga menyebabkan mendapatkan pekerjaan yang rendah pendapatannya dan rendahnya daya beli.
2. *insufficient Demand For Labor*, yakni rendahnya permintaan akan tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran, pengangguran menyebabkan orang tidak memliki pendapatan, daya beli rendah akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dasar.
3. *Disriminatior,*adanya perlakuan berbeda terhadap golongan tertentu terutama dalam aksesibilitas terhadap sumberdaya sumberdaya dan adanya dominasi pihak tertentu terhadap sumberdaya tersebut.

### 2.3.6 Klasifikasi Fakir Miskin

 Fakir miskin yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kebalikannya adalah orang-orang mampu dan berkecukupan. Seseorang dapat dikatakan mampu apabila dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya dan anggota keluarganya, berupa sandang, pangan, dan papan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 tingkatan kemampuan warga atau masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Sangat Miskin adalah warga yang hanya memiliki kemampuan memenuhi kurang dari setengah kebutuhan dasarnya.
2. Miskin adalah warga yang memiliki kemampuan memenuhi lebih setengah dari kebutuhan dasarnya, tapi tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan dasarnya.
3. Hampir miskin adalah warga yang memiliki kemampuan memenuhi hanya lebih sedikit dari kebutuhan dasarnya
4. Rawan miskin adalah warga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi kalu terjadi gejolak ekonomi/kenaikan harga harus menanggung biaya tidak terduga yang sifatnya mendesak (misalnya biaya pengobatan, maka ia akan jatuh miskin.

### 2.3.7 Kriteria Fakir Miskin

Kriteria fakir miskin berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan
5. Kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai rumah yang dindingnya terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai rumahnya terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
8. Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Penerangan bangunan tempat tinggalnya bukan dengan listrik, atau dengan listrik mencantol dari rumah tetangga;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan
11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

 Tolak ukur kriteria fakir miskin adalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang dan kualitas rumah yang dimiliki perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, karena dengan terpenuhi kebutuhan papan bersama keluarganya keluarga tersebut dapat memenuhi menurut kehidupannya dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai bencana bagi pemerintah negara untuk menanganinya sangat sulit..

## 2.4 Konsep tentang Masalah Sosial

### 2.4.1 Definisi Masalah Sosial

Penanganan masalah sosial diawali dengan identifikasi masalah yang dapat memberikan kesadaran akan adanya masalah sosial tertentu. Fenomena masalah sosial dapat dipahami dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mempelajari masalah sosial telah berkembang pemikiran, masing-masing pemikiran tersebut memiliki sudut pandang dan alur berpikir yang berbeda dalam penjelasannya. Definisi Maslah sosial menurut Soekanto, (2013: 314) adalah sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial.

Masalah sosial menurut pernyataan tersebut masalah sosial dianggap sebagai persoalan yang timbul secara langsung pada kondisi dan proses sosial. Masalah sosial menyangkut pada nilai sosial dan moral sosial, masalah tersebut menjadi persoalan karena bersifat menyimpang dan merusak. Masalah sosial menurut Robert K Merton dalam Huraerah (2011: 5) adalah sebagai berikut “Masalah sosial mendefinikan dengan menyebutkan ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya jurang perbedaan yang cukup signifikan antar standar-standar sosial dengan kenyataan sosial”. Oleh karena itu, menurut Merton Masalah Sosial selalu mengacu pada jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seseorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan apa yang dapat doperoleh orang dalam suatu masyarakat. Dari definisi diatas dijelas bahwa masalah sosial adalah suatu kondisiantara keinginan dan harapan tidak sesuai, serta kurangnya pemecahan masalah yang terjadi.

### 2.4.2 Komponen-Komponen Masalah Sosial

Menurut Parrio, (1987: 14) dalam Soetomo, (2013: 6) menyatakan: “Masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur tadi.” Komponen-komponen yang terdapat dalam masalah sosial adalah sebagai berikut :

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan

Menurut Parillo yang dikutip Soetomo (1995: 14) dalam Huraerah (2011: 25) yang menyatakan untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu memperhatikan komponen- komponen sebagai yaitu :

1. Masalah itu bertahan untuk satu periode tertentu.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelamggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan

 Komponen tersebut saling berhubungan diantara satu dengan yang lain, masalah sosial hanya dapat bertahan diwaktu tertentu, dapat dirasakan banyak orang, menimbulkan kerugian dan barulah membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial tersebut.

### 2.4.3Karakteristik Masalah Sosial

Karakteristik masalah sosial jika dilihat dari aspek-aspek tertentu, kriteria masalah sosial dapat dilihat secara sempit dan sebelah mata, karakteristik masalah sosial sebenarnya memiliki kriteria yang dapat ditetapkan secara jelas dan tepat. Karakteristik masalah sosial menurut Suharto(2008: 71) adalah sebagai berikut :

1. Kondisi yang Dirasakan Banyak Orang.

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai beberapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadiu pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media masa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kriminalitas adalah contoh masalah sosial.

1. Kondisi yang Dinilai Tidak Menyenangkan.

Menurut paham Hedonisme, orang cenderung mengulai sestuatu yang menyenangkan dan menghindari sesutau yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan peran masyarakat sangat penting dalam menentukan sutau kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran ‘baik’ atau 'buruk' sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Pengunaan narkotika, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum.

1. Kondisi yang Menuntut Pemecahan.

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senatiasa menuntut pemecahan jika seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan, umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasakan bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

1. Pemecahan Tersebut Harus Dilakukan Melalui Aksi Sosial Secara Kolektif.

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah sosial Individual dapat diatasi secara perorangan atau satu persatutetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (social engineering) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

### 2.4.4 Jenis-jenis Masalah Sosial

 Masalah atau problema adalah perbedaan antara (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan dan yang diharapkan)adalah perbedaan yang diidealkan dan yang real. Contoh kan kita mencita-citakan masyakat yang sejahtera, ternyata yang terjadi banyak masyarakat yang miskin. Kita meninginkan masyarakat yang cinta damai, yang terjadi malah masyarakat yang sering  tauran dan bentrok antar masarakatnya.

## 2.5 Konsep Perumahan Swadaya

### 2.5.1 Definisi Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah merupakan kebutuhan dasar papan masyarakat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena rumah sebagai tempat tinggal setiap individu maupun anggota keluarga untuk sebagai tempat sarana pelindung, berkomunikasi, dan asset untuk yang memilikinya. Definisi Rumah, Perumahan Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Ayat 5 sampai dengan Ayat 8 Tahun 2016 yaitu:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
2. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
3. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagi bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLTH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangungan, dan kesehatan penghuni. Definisi lain dari rumah tidak layak huni menurut Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/M/PR.01.03/01/2012 adalah sebagai berikut: “Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi standar layak huni yang mencakup kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan”.

 Berdasarkan definisi di atas rumah atau rumah tidak layak huni memiliki kriteria tersendiri dalam dalam penentuannya.,yaitu dilihat dari kualitas bangunan rumah yang dimiliki seperti dinding, lantai, atap dan lain-lain.Kriteria rumah tidak layak huni menurut Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR huni adalah sebagai berikut:

* + - 1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
			2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
			3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
			4. Rusak berat, dan/atau
			5. Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2

### 2.5.2 Definisi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat untuk membantu masyarakat atau kepala keluarga untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi lebih layakhuni. Definisi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2016 yaitu:

Bantuan stimulan perumahan swadaya adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di singkat BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadayabahan bangunan untuk pembangunan rumah baru maupun perbaikan rumah, dengan memperbaiki kualitas bangunan rumah tersebut. Bantuan stimulant swadaya muali diberikan terhadap masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung pada tahun 2016 dan akan dilaksanakan kembali pada 2017.

### 2.5.3 Tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

 Tujuan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya pada dasarnya yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial dari masyarakat, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar papan masyarakat tersebut.Tujuan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 menimbang:

1. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulant perumahan swadaya;
2. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulant rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 54 adalah sebagai berikut: “Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu program yang lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa:
	1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
	2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan,
	3. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa:
	4. Subsidi perolehan rumah;
	5. Stimulan rumah swadaya;
	6. Insentif perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan;
	7. Perizinan;
	8. Asuransi dan penjaminan;
	9. Penyediaan tanah;
	10. Sertifikasi tanah; dan/atau
	11. Prasarana, sarana, dan utilitas umum”.

 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/ 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/ Lembaga, serta petunjuk-petunjuk teknis yang berupa surat edaran yang dikeluarkan Kementrian Perumahan Rakyat.

### 2.5.4 Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadayabahan bangunan untuk pembangunan rumah baru maupun perbaikan rumah, dengan memperbaiki kualitas bangunan rumah tersebut. Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2016 yaitu:

1. a. Pembangunan Rumah Baru pengganti RLTH; atau

b. Pembangunan Rumah baru.

1. Pembangunan baru pengganti RLTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen non structural dengan kondisi rusak total.
2. Komponen non structural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
3. Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan diatas kavling tanah matang.

### 2.5.5 Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Persyaratan penerimaBantuan Stimulan Perumahan Swadayaperlu untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perumahan dan Pekerjaan dan Pekerjaan Umum yaitu diantaranya memenuhi syarat administrasi, proposal dan seleksi. Persyaratan penerimaBantuan Stimulan Perumahan Swadayadalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 13 Ayat 1 Tahun 2016 yaitu:

1. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. memiliki atau menguasai tanah;
3. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat;
5. berepenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
6. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;.
7. bersedia membentuk kelompok dan
8. bersedia membuat pernyataan.

### 2.5.6 Kriteria dalam Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

 Proses pemberian bantuan masyarakat dituntut untuk dapat memahami persyaratan terlebih dahulu, kriteria yang telah ditetapkan dan persetujuan kota/wilayah setempat untuk mengajukan bantuan stimulant perumahan swadaya. Kriretia dalam penerimaan bantuan perumahan swadaya antara lain :

#### Kriteria Objek Bantuan

* + - 1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
			2. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
			3. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
			4. Tidak dalam status sengketa, dan
			5. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
			6. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling
			7. Tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2
			8. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas
			9. Perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
			10. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran

#### Kriteria Subjek Penerima Bantuan

WNI

1. MBR dengan penghasilan dibawah UMP rata-rata nasional
2. Sudah berkeluarga
3. Memiliki atau menguasai tanah
4. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
5. Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah
6. Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan:
	* + 1. Memiliki tabungan bahan bangunan
			2. Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
			3. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
			4. Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS
7. Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS
8. Dapat bekerja secara berkelompok

#### Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan

 Penerima Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki kemampuan memenuhi lebih setengah dari kebutuhan dasarnya, tapi tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan dasarnya dan penerima bantaun stimulant swadaya meliputi perseorangan atau kelompok. Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Surat Edaran Kementrian Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/DS/4/2012 (MBR) adalah: “Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya belisehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah. Standar maksimum penghasilan calon penerima bantuan adalah Rp.1.250.000,- per bulan. Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumah, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan, serta didahulukan yang sudah diberdayakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Adapun besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan ialah Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000 dengan sumber pendanaan murni dari APBD.”

#### Kriteria Umum dan Khusus Kabupaten/Kota Penerima Bsps

##### Kriteria Umum

* + - 1. Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional
			2. Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional
			3. Jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional
			4. Daerah tertinggal, atau
			5. Daerah perbatasan Negara

##### Kriteria Khusus

* + - 1. Program khusus
			2. Pelaksanaan direktif Presiden
			3. Termasuk program percepatan pembangunan nasional
			4. Pelaksanaan kesepahaman (MoU); dan/atau
			5. Terdapat perumahan dan permukiman kumuh
			6. Memiliki Komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam DPA tahun

Berjalan)

1. Program Perumahan melalui APBD
2. Memiliki dana operasiona

## 2.6 Konsep Kebutuhan

### 2.6.1 Definisi Kebutuhan

Kebutuhan manusia itu bersifat dinamis, karena kebutuhan manusia berubah secara kuantitas dan kualitas. Kebutuhan manusia tanpa batasan dan titik untuk berhenti. Kebutuhan manusia perlu untuk dipenuhi dan tidak harus dipenuhi. diisesuaikan dengan tingkat pendapatan masayarakat.Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar bagi setiap individu untuk berusaha. Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Definisi kebutuhan sosial menurut Hutman (1981: 21) dalam Suharto, (2009: 8) adalah sebagai berikut: “Kebutuhan sosial adalah suatu gagasan bahwa terdapat standar mengenai kualitas hidup yang harus ditetapkan dan manakala ini tidak terpenuhi maka kebutuhan sosial menjadi masalah sosial.”

 Pernyataan di atas menyampaikan bahwa tidak berfungsinya masyarakat disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-harinya. Kebutuhan dasar merupakan unsur penting yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup.

### 2.6.2 Definisi Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar manusia pada setiap manusia bentuknya sama, walaupun masing-masing memiliki latar belakang sosial, budaya, persepsi, dan pengetahuan yang berbeda. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tingkat prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi adalah kebutuhan dasar dengan tingkat prioritas yang paling tinggi atau utama.Definisi konsep kebutuhan dasar manusia menurut Hidayat dan Uliyah, (2004: 4) adalah sebagai berikut : “Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankankehidupan dan kesehatan.”

Manusia dalam menjalani kehidupan perlu untuk memenuhii lima kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri yang menjadi dasar-dasar dalam pemenuhan kebutuhan. Definisi kebutuhan dasar menurut Jean Waston dalam Hidayat dan Uliyah, (2014: 6) adalah sebagai berikut :

Kebutuhan dasar manusia dibagi ke dalam dua peringkat utama, yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah *(lower order needs)* dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi *(higher order needs)*. Pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain dan semuanya dianggap penting.

 Kebutuhan dasar manusia berdasarkan pernyataan tersebut kebutuhan dasar manusia tertentu lebih mendasar dari pada kebutuhan lainnya, karena beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar manusia seperti makan ,air, keamanan dan cinta merupakan hal yang penting bagi manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagi berikut:

1. Kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah (*Lower Order Needs*) dibagi menjadi dua yaitu, kebutuhan bertahan hidup (biofisika) berupa kebutuhan : Makan, Minum, Eliminasi dan Ventilasi. Kemudian ada kebutuhan fungsional (psikofisikal) berupa kebutuhan : Aktivitas, Istirahat dan Seksualitas.
2. Kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi (*Higher Order Needs*) dibagi menjadi dua yaitu, kebutuhan integratif (psikososial) berupa kebutuhan : Berperstasi dan Berfaliasi. Kemudian ada kebutuhan untuk berkembang (intrapersonal interpersonal) berupa kebutuhan Aktualisasi Diri.

Kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah menjadi kebutuhan yang paling mendasar yang perlu dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari manusia seperti makan, minum, eliminasi, ventilasi, aktivitas, istirahat dan seksualitas semua itu adalah kebutuhan yang sering kali menjadi kebutuhan yang paling mendesak pada manusia. Pemenuhan kebutuhan ini dapat mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga guna meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera. Mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia tersebut dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia.

### 2.6.3 Teori Hierarki Kebutuhan Dasar Manusia

 Proses kehidupan manusia berlangsung secara perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara dan lingkungan, dengan arti lain kebutuhan dasar sangat berpengaruh dengan kehidupan manusia. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dan Perry (1997) dalam Hidayat dan Uliyah, (2014: 6) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti oksigen, cairan (minuman), nutrisi (makanan), keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual.

2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi kebutuhan fisik dan psikologis.

1. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup. Ancaman tersebut dapat berupa penyakit, kecekaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya.
2. Perlindungan psikologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya.

3. Kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, mendapatkan kehangatan keluarga, memiliki sahabat, diterima oleh kelompok sosial, dan sebagainya.

4. Kebutuhan akan harga diri ataupun perasaan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain/lingkungan serta mencapai potensi diri



**Gambar 2.1 Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Maslow**

**Sumber: dalam Hidayat dan Uliyah, (2014: 8)**

 Diagram di atas mengmabarkan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti oksigen, caiaran (minuman), nutrisi (makanan), keseimbangan suhu tubuh, eliminasi tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual.Pemenuhan kebutuhan manusia secara fungsi fisiologis yaitu perubahan fisik yangmenimbulkan adaptasi fisiologis dalam mempertahankan keseimbangan, contohnya keseimbangan cairan, elektrolit, dan fungsi endoktrin. Perubahan konsep diri merupakan keyakinan perasaan diri sendiri yang menyangkut persepsi, perilaku dan respon. Adanya perubahan fisik akan mempengaruhi pandangan dan persepsi terhadap dirinya, sebagai contoh gangguan citra diri. Perubahan fungsi peran, karena adanya ketidakseimbangan akan mempengaruhi fungsi dan peran seseorang.

### 2.6.4 Komponen Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar pada tujuannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial maupun lingkungannya, tetapi kebutuhan dasar memiliki komponen dalam pembagiankebutuhan dasar manusia.Menurut Virginia Henderson dalam Hidayat dan Uliyah, (2014: 5) membagi kebutuhan ke dalam 14 komponen yaitu sebagai berikut:

1. Bernafas secara normal
2. Makan dan minum cukup
3. Eliminasi (buang air besar dan kecil)
4. Bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan
5. Tidur dan istirahat
6. Memilih pakaian yang tepat
7. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian yang dikenakan dan memodifikasi lingkungan
8. Menjaga kebersihan diri dan penampilan
9. Menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan dari orang lain
10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini
11. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
12. Bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup
13. Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi
14. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia.

 Kebutuhan dasar adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan untuk memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Kebutuhan adalah keinginan manusia pada suatu benda atau jasa yang memberikan kepuasan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia terdapat dua kebutuhan, yaitu kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) dan bersifat abstrak (tidak nyata). Contohnya yaitu ingin dihargai, rasa aman..

### 2.6.5 Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Dasar Manusia

Kebutuhan dasar manusia apalabila tidak terpenuhi dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat menimbulkan masalah keberfungsian sosial manusia, contohnya yaitu karena tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan. Pengaruh lainnya dapat menjadi factor yang berpengaruh dalam terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia menurut Hidayat dan Uliyah, (2014: 4) adalah sebagai berikut :

1. **Penyakit.** Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan,baik secara fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya.
2. **Hubungan keluarga.** Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak adanya rasa curiga, dan lain-lain.
3. **Konsep diri.** Konsep diri manusia memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan (wholeness) bagi seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif terhadap diri. Orang yang merasa positiftentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan, dan mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. **Tahap perkembangan.** Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial,maupun spiritual, mengingat berbagai fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda.

Faktor tersebut menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tersebut

## 2.7 Konsep Pekerja Sosial

### 2.7.1 Definisi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *Human Relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidak berfungsian sosial.Definisi Pekerjaan Sosial menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38), adalah sebagai berikut :

Aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi di atas bahwa pekerjaan sosial erat kaitannya dengan kegiatan untuk membantu menolong dari masalah sosial yang dihadapi individu atau kelompok maupun masyarakat untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya agar dapat menjalankan fungsi dan tugas hidupnya di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *Human Relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidak berfungsian sosial. Oleh sebab itu, relasi antar manusia merupakan inti dari profesi pekerjaan sosial.

### 2.7.2 Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi dasar pekerjaan sosial menurut Max Siporin, (1975) dalam Huraerah (2008: 39) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan akses *(access services),* mencakup pelayanan informasi,rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebaginya.

Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat pasif, melainkan holistik dan berkelanjutan menurut (suharto, 2006; 2007), adalah sebagai berikut : “Fokus utama penanganan masalah kemiskinan adalah pada kemiskinan adalah pelayanan sosial.” Model intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan SukamiskinKecamatan ArcamanikKota Bandung yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang dapat mempengaruhi pemenuuhan kebutuhan dasarnya. Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerja sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan right-based initiatives; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan aspirasi terbaik mereka.